

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(APBD) DENGAN VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kendal)**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

VIDYA NUGRA KENCANA PUTRA
B200 110 263

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(APBD) DENGAN VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kendal)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

VIDYA NUGRA KENCANA PUTRA
B200 110 263

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. ZULFIKAR, SE, M.SI

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(APBD) DENGAN VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kendal)**

Yang ditulis oleh :

VIDYA NUGRA KENCANA PUTRA
B200 110 263

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari sabtu, 30 April 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Nursiam, Ak., M.H.
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Dra. Mujiyati, M.Si.
(Anggota 2 Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(.....)
Priyono, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pun pendapat pernah ditulis atau orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila tidak terbukti ada ketidak benara dalam pernyataan diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 30 April 2016

Penulis



Vidya Nugra K. P.
B200 110 263

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN
VARIABEL MODERATING**

(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Kendal)

VIDYA NUGRA KENCANA PUTRA

B200 110 263

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Email :

Viaez79@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, komitmen organisasi, dan budaya organisasi terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *sampling jenuh*. Penelitian ini menggunakan alat analisis Moderate Analysis Regresi (MRA). Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD). Partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan akuntabilitas, komitmen organisasi, dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah*

ABSTRACT

In research conducted to determine whether accountability, public participation, transparency of public policy, organizational commitment, and organizational culture as moderating the relationship between the knowledge of the board on the budget and financial control area (budget). This research use the quantitative method and using the primary data which get from questioner. Method for get the sample is Analytic tool for this research is Moderate Analysis Regression (MRA). The results in this study is the relationship between knowledge about budgetary council affect oversight of local finance (budget). Public participation, and transparency of public policy has affect to relationship between knowledge about budgetary council affect oversight of local finance (budget). Which are accountability, organizational commitment, and organizational culture does not affect the relationship between between knowledge about budgetary council affect oversight of local finance (budget).

Kata Kunci: *Accountability, Public Participation, Transparency of public policy, Organizational commitment, Organizational culture and knowledge about budgetary council affect oversight of local finance.*

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya reformasi itu merupakan bagian dari dinamika organisasi. Maksudnya, perkembangan yang terjadi akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaruan dan perubahan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Hanya saja reformasi dalam konteks Indonesia telah dipandang sebagai suatu perubahan yang bersifat radikal. Istilah reformasi dimaknai sebagai *“to change while preserving, to change without destroying”*, yang berarti reformasi adalah suatu proses mengubah atau menyesuaikan suatu sistem seraya memelihara substansinya, tanpa merusak sistem itu sendiri (Juliartha, 2009) dalam (Putriana, 2014).

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah desentralisasi keuangan dan otonomi daerah (Mayasari, 2012).

Menurut Krina (2003), Prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien dari para aparat birokrasi. (2) Transparansi, Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. (3) Partisipasi Masyarakat. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Astuti (2015) menyimpulkan bahwa : (1) pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengawasan dewan pada keuangan daerah, (2) komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, (3) akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, (4) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, (5) transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian kembali dengan mengambil pembahasan mengenai hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) yang terkait dengan prinsip *good governance*, komitmen organisasi, dan budaya organisasi dikarenakan ditemukan ketidak-konsistenan terhadap

hasil yang diperoleh. Selain itu, ditemukannya penyimpangan dana anggaran di Kabupaten Kendal seperti yang telah disebutkan diatas.

II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTETIS

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja dalam satu periode dan sumber pendapatannya. Definisi anggaran menurut Wildafsky (1975) dalam Arif, dkk. (2002:14) anggaran sebagai catatan masa lalu, rencana masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyaluran pendapatan, mekanisme untuk negosiasi, harapan aspirasi strategi organisasi, satu bentuk kekuatan kontrol, dan alat atau jaringan komunikasi.

Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2013:20).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung (Utami dan Syofyan, 2013).

Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi Kebijakan Publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu (Pangesti, 2013).

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini dalam sangat perlu dimiliki (Pramita dan Andriyani, 2010).

Budaya Organisasi

Budaya merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah laku (Suwanto dan Koeshartono, 2009:1).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Utami dan Syofyan (2013) dengan judul “ Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik”.

Penelitian Pramita dan Andriyani (2010) dengan judul “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) “. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan.

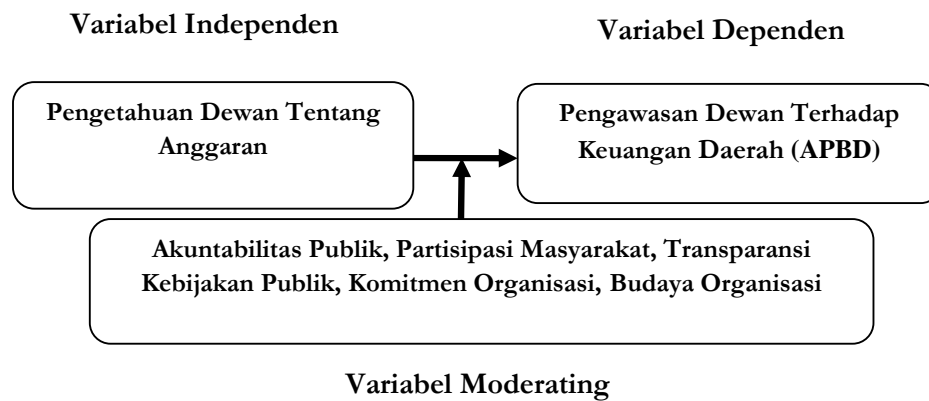
Penelitian Darma dan Hasibuan (2012) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian Pangesti (2013) dengan judul “Analisis Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Menggunakan Variabel Moderating”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) .

Penelitian R. Putriana (2014) dengan judul “Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Budaya Organisasi, Komitmen organisasi dan Prinsip Good Governance Sebagai Variabel Pemoderating.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD).

Kerangka Pemikiran

Sedangkan skema hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut :



Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Menurut Yudoyono (2002) dalam Nayang (2008) dalam Utami dan Syofyan (2013), pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggota yang memiliki kualitas yang tinggi, anggota dewan tersebut harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan substansi bidang

tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsep teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

Akuntabilitas dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20). Dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai principal dan publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal (Pramita dan Andriyani, 2010).

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Erlina, 2008 dalam Utami dan Syofyan, 2013). Achmadi, dkk (2002) dalam Erlina (2008) dalam Utami dan Syofyan (2013) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap eksekutif dan legislatif.

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah antara lain akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat

diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002 dalam Utami dan Syofyan, 2013).

Dengan demikian diharapkan bahwa semakin transparan kebijakan publik dalam hal ini adalah APBD, maka dapat meningkatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan semakin kuat ketika dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik (Utami dan Syofyan, 2013).

H4: Tranparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Komitmen Organisasi dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002) dalam (Suhartono, 2006) dalam (Pramita dan Andriyani, 2010). Komitmen organisasi dewan sangat penting mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai). Hal tersebut bisa jadi memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini dalam sangat perlu dimiliki.

H5: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Budaya Organisasi dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

Budaya menjadi salah satu hal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena secara langsung dewan berinteraksi dengan budaya yang ada di lingkungannya, yang dimana lingkungan biasanya dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan tugas dan memaksimalkan fungsinya dalam pemerintahan (Putriana, 2014).

H6: Pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh budaya organisasi.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010), Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi, Sampel Dan Pengambilan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejasian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002:115). Populasi juga dapat diartikan sebagai sekelompok individu atau objek penelitian yang diduga mempunyai karakteristik yang sama yang kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2012:81), “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian.

Data Dan Sumber Data.

Data penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara) dalam Supomo (2004:146). Data primer yang diperoleh peneliti dari lapangan yaitu berupa kuesioner yang ditujukan pada responden di DPRD Kabupaten Kendal.

Metode survey yang digunakan adalah dengan mengajukan pertanyaan tertulis melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. Penjelasan petunjuk pengisian kuesioner dibuat sesederhana dan sejelas mungkin untuk mempermudah pengisian jawaban. Data yang diambil dari opini terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut mewakili tujuh variabel yang akan diukur. Ketujuh variabel tersebut diukur dengan model skala likert dengan skor 5 (SS= Sangat Setuju), 4 (S= Setuju), 3 (TT= Tidak Tahu), 2 (TS= Tidak Setuju), dan 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner langsung yang dibagikan ke DPRD. Metode kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199).

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel Dependen

Variabel Dependen

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Pengawasan keuangan daerah (APBD) itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Variabel Independen

Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Variabel Moderating

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Partisipasi Masyarakat

Demi terciptanya akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi Kebijakan Publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan pengacuan kepada sebuah sistem yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya.

Metode Analisis Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis. Maka dari itu, peneliti mengumpulkan data berupa penyebaran kuesioner kepada responden, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel, melakukan perhitungan-perhitungan yang berkaitan rumusan masalah yang akan diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2012:147).

Uji Statistik Deskriptif

Deskriptif mempunyai tujuan untuk menjelaskan distribusi data dari variabel yang diteliti sekaligus mengukur pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, budaya organisasi terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD di Kab. Kendal sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti.

Uji Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dari suatu penelitian. Dan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah disusun peneliti diterima atau ditolak, maka diadakanlah suatu pengujian terhadap hipotesis itu sendiri.

Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda adalah suatu teknik analisis regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval.

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

1) Persamaan regresi 1 :

$$Y = \alpha + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{PDTA} + e$$

Dimana :

Y = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

Error! Reference source not found. = Koefisien Regresi

PDTA = Pengetahuan dewan tentang anggaran

2) Persamaan regresi 2 :

$$Y = \alpha + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{PDTA} + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{AP} + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{PM} + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{TKP} + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{KO} + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{BO} + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{PDTA} \times \text{AP} + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{PDTA} \times \text{PM} + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{PDTA} \times \text{TKP} + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{PDTA} \times \text{KO} + \text{Error! Reference source not found.} \cdot \text{PDTA} \times \text{BO} + e$$

Dimana:

Y = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,...,Error! Reference source not found. = Koefisien Regresi

PDTA = Pengetahuan dewan tentang anggaran

AP = Akuntabilitas Publik

PM = Partisipasi Masyarakat

TKP = Transparansi Kebijakan Publik

KO = Komitmen Organisasi

BO = Budaya Organisasi

Uji Signifikan Simultan (uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat signifikansi F.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN

Persamaan 1

Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan 1

Variabel	Koefisien Regresi	(sig)	Keterangan
----------	-------------------	-------	------------

(Konstan)	7,044	0,576	
PDTA	0,587	0,000	Signifikan

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil regresi tersebut diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$PD = 7,044 + 0,587PDTA + e$$

Dari persamaan linier berganda diatas memberikan keterangan sebagai berikut:

Koefisien regresi pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 0,587 dengan parameter positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran, maka akan mengakibatkan terjadi peningkatan pada pengawasan dewan terhadap keuangan daerah.

Persamaan 2

Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan 2

Variabel	Koefisien Regresi	(sig)	Keterangan
(Konstan)	49,135	7,044	
PDTA*AP	-0,005	0,836	H2 tidak signifikan
PDTA*PM	-0,046	0,016	H3 signifikan
PDTA*TKP	0,076	0,012	H4 signifikan
PDTA*KO	0,006	0,841	H5 tidak signifikan
PDTA*BO	0,012	0,577	H6 tidak signifikan

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil regresi tersebut diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$PD = 49,135 - 0,195PDTA + 0,723AP + 2,857PM - 4,912TKP - 0,464KO - 0,500BO - 0,005PDTAxAP - 0,046PDTAxPM + 0,076PDTAxTKP + 0,006Error! Reference source not found.PDTAxKO + 0,012PDTAxBO + e$$

Koefisien regresi PDTA*AP sebesar 0,005 dengan parameter negatif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap PDTA*AP, maka akan mengakibatkan terjadi penurunan pada pengawasan dewan terhadap keuangan daerah.

Koefisien regresi PDTA*PM sebesar 0,046 dengan parameter negatif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap PDTA*PM, maka akan mengakibatkan terjadi penurunan pada pengawasan dewan terhadap keuangan daerah.

Koefisien regresi PDTA*TKP sebesar 0,076 dengan parameter positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap PDTA*TKP, maka akan mengakibatkan terjadi peningkatan pada pengawasan dewan terhadap keuangan daerah.

Koefisien regresi PDTA*KO sebesar 0,006 dengan parameter positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap PDTA*KO, maka akan

mengakibatkan terjadi peningkatan pada pengawasan dewan terhadap keuangan daerah.

Koefisien regresi PDTA*BO sebesar 0,012 dengan parameter positif. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap PDTA*BO, maka akan mengakibatkan terjadi peningkatan pada pengawasan dewan terhadap keuangan daerah.

V. Kesimpulan dan saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Akuntabilitas publik tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencakup anggota DPRD di Kabupaten Kendal, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas.
2. Peneliti hanya menggunakan satu variabel independen yang mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) yaitu, pengetahuan dewan tentang anggaran, dan lima variabel moderating yaitu; akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, komitmen organisasi dan budaya organisasi. Sehingga terdapat variabel independen lain yang belum mampu dijelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
3. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui

penggunaan instrumen kuesioner secara tertulis tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian mendatang dapat menggunakan sampel secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bisa digeneralisasi, bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi penelitian mendatang hendaknya dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) selain variabel yang digunakan agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna, atau bisa juga menambahkan variabel intervening.
3. Diperlukan pendekatan kualitatif untuk memperkuat kesimpulan karena instrumen penelitian rentan terhadap persepsi responden yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam diri masing-masing. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan observasi atau pengamatan langsung ke dalam obyek dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan yang dijadikan lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Astuti, Atik. 2015 *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Wonogiri)*. Surakarta: UMS.
- Darma dan Hasibuan. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating*. Jurnal MEDIASI, Vol. 4, No. 1 Juni. Medan.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Krina P., Loina, Lalolo, 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Laksmi Riani, A. 2011. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, Rosalina. 2012. *Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintah yang Baik sebagai Variabel Moderating*. Jurnal JENIUS, Vol. 2 No. 1 Januari. Palembang.
- Nurjanah, S.E. 2008. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Biro Lingkup Departemen Pertanian)*. Semarang: UNDIP.
- Pangesti, Agustina. 2012. *Analisis Pengetahuan Dewan Tentang Keuangan Daerah (APBD) dengan Menggunakan Variabel Moderating*. Accounting Analysis Journal. Semarang.
- PP Nomor 105 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
- Pramita dan Andriyani. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)*. SNA 13. Purwokerto.
- Putriana, R. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Prinsip Good Governance Sebagai Variabel Pemoderating (Penelitian Pada DPRD Kabupaten Purwakarta)*. Bandung: UPI.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwarto, F. X. dan D. Koeshartono. 2009. *Budaya Organisasi: Kajian Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Utami dan Syofyan. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Jurnal WRA, Vol 1, No. 1 April. Padang.